

Dr. Ermansjah Djaja, S.H, M.Si.

Kajian Yuridis

UURI Nomor 31 Tahun 1999

juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001

Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002

juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009

Memberantas Korupsi

EDISI
KEDUA

Bersama **KPK**
Komisi Pemberantasan Korupsi

KAAN
RANATA

323



Printed

SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR EDISI PERTAMA	vii
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA.....	xi
 BAB 1 MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIHINDARI, DISOSIALISASI, DAN DIBERANTAS	 1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi, Pengertian dan Asal Kata Korupsi	19
C. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	28
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia	31
E. Korupsi dalam Berbagai Aspek dan Pendekatan	48
F. Penyebab Korupsi di Indonesia	48
G. Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UURI No. 20 Tahun 2001 ...	51
H. Tipologi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UURI No. 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> UURI No. 20 Tahun 2001 ...	52
I. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik	82
J. Institusi yang Berwenang Memberantas Korupsi	94

BAB 2 KAJIAN YURIDIS NORMATIF UU NOMOR 31 TAHUN 1999 <i>JUNCTO</i> UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	97
A. Pendahuluan	97
B. Konsiderans	98
C. Ketentuan Umum	101
D. Tindak Pidana Korupsi	105
E. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	164
F. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	170
G. Peran Serta Masyarakat	233
H. Ketentuan Lain-Lain	241
I. Ketentuan Peralihan	248
J. Ketentuan Penutup	251
 BAB 3 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	254
Bagian Kesatu: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	254
A. Umum	254
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	260
C. Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi	268
D. Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Susunan Organisasi	269
E. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi	289
F. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan	294
G. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	299

H. Rehabilitasi dan Kompensasi	304
I. Pembiayaan Komisi Pemberantasan Korupsi	305
J. Ketentuan Pidana bagi Anggota dan Pegawai KPK	305
K. Ketentuan Peralihan	306
L. Ketentuan Penutup	307

Bagian Kedua: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi .. 308

A. Ketentuan Umum	309
B. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	310
C. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	312
D. Evaluasi Pelaksanaan	316
E. Tim Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi	316
F. Ketentuan-Ketentuan Lain	317

Bagian Ketiga Kajian Yuridis Normatif Peraturan KPK Nomor 05 P.KPK Tahun 2002 tentang Kode Etik Pegawai .. 319

A. Pendefinisian	320
B. Tujuan Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	321
C. Sumpah dan Janji Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	321
D. Nilai-Nilai Dasar Pribadi	321
E. Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	322
F. Pengawasan dan Sanksi	325

Bagian Keempat: Badan-Badan Pemberantasan Korupsi Sebelum KPK .. 326

1. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)	326
2. Komite Anti Korupsi (KAK)	327
3. Komisi Empat	327

4.	Operasi Tertib (OPSTIB)	328
5.	Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)	328
6.	Komisi Pemeriksa Kelayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)	328
7.	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	329
8.	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	329
BAB 4	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KON- STITUSI NOMOR 012-016-019/PPU-IV/2006 TERBENTUKNYA UURI NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	332
A.	Pendahuluan	332
B.	Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ..	333
C.	Tinjauan Yuridis Normatif	334
D.	Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Peng- adilan Tindak Pidana Korupsi	346
BAB 5	SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	348
A.	Umum	348
B.	Alat-Alat Bukti	352
BAB 6	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA	384
A.	Komisi Pemberantasan Korupsi Australia (ICAC New South Wales)	384
B.	Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong (ICAC) ..	399
C.	Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (BPR/ Badan Pencegah Rasuah)	419

D. Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura (CPIB/ <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i>)	448
E. Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand (NCCC/ <i>Nation Counter Corruption Commission</i>)	463

DAFTAR PUSTAKA	477
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	493
II. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	537
III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pem- berantasan Tindak Pidana Korupsi	585
IV. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	596
V. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	614
VI. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-07/P.KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi	620
VII. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai	646

PROFIL PENULIS	655
-----------------------------	------------